



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/07/2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PER SATUAN KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 16 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/07/2023
TANGGAL 11 JULI 2023

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (RIBUAN RUPIAH)
1	010025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	0
2	020060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	0
3	030060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.170.444.000
4	040069	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	908.824.000
5	050060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	466.704.000
6	060004	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI ACEH	534.064.000
7	070060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1.038.224.000
8	080019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	967.604.000
9	090020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI RIAU	967.664.000
10	100086	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI	960.924.000
11	110060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.081.524.000
12	120022	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.163.594.000

NOMOR ...

NOMOR URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (RIBUAN RUPIAH)
13	130019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	974.174.000
14	140018	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	665.604.000
15	150060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	968.734.000
16	160019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.004.554.000
17	417761	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	979.914.000
18	170021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.403.304.000
19	180060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.367.654.000
20	190060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	531.294.000
21	200019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.040.564.000
22	210019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU	1.475.434.000
23	220060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI	1.182.324.000
24	230020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	973.004.000
25	240026	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.397.854.000
26	250060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA	793.674.000
27	260070	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	962.374.000
28	280016	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.172.264.000

NOMOR ...

NOMOR URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (RIBUAN RUPIAH)
29	290009	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN	852.704.000
30	300092	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	906.874.000
31	310060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO	1.346.264.000
32	320099	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	976.944.000
33	330096	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	803.944.000
34	340030	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.101.754.000

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati